



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Terbelah Soal Proyek Tanggul Laut

Gubernur Anies dinilai bimbang soal kebijakan reklamasi.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak satu suara awal pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang mayoritas melibatkan swasta.

Sejumlah fraksi khawatir tanggul laut akan menjadi alat jual-beli untuk meleakkan reklamasi di Teluk Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat Taufiqurrahman mengatakan proyek tanggul laut belum bertalu mendesak digarap. Sejumlah ahli menyebutkan tidak semua wilayah berimbas banjir rob. "Jangan-jangan tanggul laut itu kepentingan pengembang yang melakukan reklamasi," kata Taufiq kepada *Tempo*, kemarin.

Taufiqurrahman pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terfokus pada kewajiban swasta membangun tanggul laut. Pembahasan kontribusi baru bisa dilakukan ketika aturan reklamasi sudah rampung dibuat. Bahkan

pemerintah DKI harus mengkaji ulang rencana proyek tanggul laut.

Di sisi lain, pemerintah meski memponyokan penerbitan peraturan daerah mengenai wilayah zonasi dan rencana tata ruang wilayah partai Utara Kedua bisa dipakai untuk menyalah kegentingan tanggul laut.

Pemerintah pusat memutuskan 75 persen proyek dari total tanggul pesisir laut sepanjang 20,1 kilometer digarap oleh swasta. Sedangkan 25 persennya digarap pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Swasta dibebani 75 persen lantaran mereka mendapat hak membangun 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Persoalan muncul karena pemerintah DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Swasta tak kunjung membangun tanggul karena DKI belum menerbitkan aturan tentang proyek tanggul laut.

Ketua Fraksi Partai

Sedangkan 25 persennya digarap pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Swasta dibebani 75 persen lantaran mereka mendapat hak membangun 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Demokrasi Indonesia Perjuangan Gembong Warsito berpendapat proyek tanggul perlu dilaksanakan. Tapi pengembang tak mungkin bersedia membangun tanggul laut jika pembangunan reklamasi tak dilanjutkan.

"Pengembang belum membangun tanggul karena sekarang tidak ada kepastian hukum," katanya.

Para pengusaha tengah menunggu sikap Anies Baswedan. Gembong menuturkan, seharusnya dia memastikan apakah proyek pulau reklamasi yang sudah berjalan diizinkan atau dibongkar.

Gembong berpedapat

penghentian reklamasi memang bersifat politis akibat janji kampanye politik Anies Baswedan pada saat pilkada 2017. "Sekarang jadi gubernur, dia jadi bimbang."

Adapun anggota Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, mengatakan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta mengkaji dan membuat regulasi mengenai kewajiban membangun tanggul laut. Menurut dia, ada kemungkinan swasta akan meminta kompensasi jika harus membangun tanggul.

Kompensasinya adalah pembangunan ekonomi di kawasan pesisir laut, salah satunya reklamasi. Politikus dari partai yang mengustung Anies-Sandiaga Uno tersebut menyatakan pengembang tak mau membangun tanggul tanpa kompensasi.

Wakil Ketua Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Gama Sinurat, mengatakan reklamasi dan proyek tanggul laut terdahul sudah dibahas secara internal. "Ini masih dirapikan," tuturnya. •

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN ITUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Terbelah Soal Proyek Tanggul Laut

Gubernur Anies dinilai bimbang soal kebijakan reklamasi.

Membeber Kewajiban Tanggul

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional mencanangkan pembangunan tanggul sepanjang 120,2 kilometer di pantai Banten, melintasi Jakarta, hingga di ujung Jawa Barat.

Proyek itu terbagi atas pembangunan garis pantai sepanjang 62,6 kilometer dan muara sungai 57,6 kilometer.

Sejumlah wilayah kritis yang membutuhkan tanggul:

- Kamal Muara sepanjang 580 meter sudah dibangun oleh Kementerian PUPR.
- Muara Angke sepanjang 2.300 meter sudah dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta.
- Pantai Wultera sepanjang 1.500 akan dibangun oleh pengembang PT Intiland Tbk (belum dilaksanakan).
- Pluit sepanjang 360 meter dibangun oleh Kementerian PUPR.
- Sunda Kalapa sepanjang 3.000 meter sudah dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta.
- Ancol sepanjang 7.000 meter akan dibangun oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (belum dilaksanakan).
- Kalibaru sepanjang 3.900 meter sudah dibangun oleh Kementerian PUPR.
- Kali Blencong sepanjang 1.415 meter sudah dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta.

Progres Proyek yang Dibangun Kementerian PUPR:

- Paket I di Muara Baru telah mencapai 88 persen. Rencananya akan dipasang 2.300 site pile. Yang sudah terpasang sekitar 2.200 site pile.
- Paket II di Kalibaru telah mencapai 98 persen. Telah terpasang 2.200 site pile. Saat ini dalam tahap penyelesaian akhir.

Kewajiban Membangun Tanggul Pantai 62,6 Kilometer:

- FT Kapuk Naga Indah (11,2 kilometer)
- Agung Perdimoto Group (773 meter)
- TIC (3,8 km)
- Tangerang (580 meter)
- Muara Angke (446 meter)
- FLN Muara Karang (756 meter)
- FT Intiland (1,4 km)
- FT Bogasari (1 km)
- Nizam Zachman (1,2 km)
- Pelindo SK (4,5 km)
- Pelindo TP (5,1 km)
- FT DK3 (923 meter)
- Port Kalibaru (434 meter)
- FT PJA (7,1 km)
- TPOT (952 meter)
- Marunda Ctr (2,8 km)
- PLN M. Tawar (1,2 km)
- Bekasi (6,6 km)
- Kawasan Berikat Nusantara (3,6 km)

Kewajiban Membangun Tanggul Muara Sungai 57 kilometer:

- Kali Tegang (6.775 meter)
- Kali Kamal (980 meter)
- Kali Tanjungar (2.059 meter)
- Drain Kapuk Naga Indah (3.820 meter)
- Cengkareng Drain (7.363 meter)
- Kali Angke (267 meter)
- KBB (4.927 meter)
- Kali Adem (3.632 meter)
- Marina (1.596 meter)
- Muara Karang (1.336 meter)
- Kali Ancol (1.837 meter)
- Cakung Drain (12.040 meter)
- Kali Blencong (4.983 meter)
- Kawasan Berikat Nusantara (3.413)